

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku- Buku

- Hadiwinata, Bob.S. (2007). *Good Governance Konsep Dan Teori*. Bandung.
- Hafifah, S. S. (2003). *Invasi Partisipasi Dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaelan. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta.
- Marzuki, Peter. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Matul, Huda. N. (2020). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press
- N.A.M Sihombing , R. (2021 ). *Hukum Pemerintahan Desa* . Medan : Enam Media .
- Peorodarmito. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa.
- Rochman, M. G. (2000). *Good Governance Prinsip Komponen Dan Penerapannya*. Jakarta: Komnas HAM.
- Santoso, Pandji. (2008). *Administrasi Publik Teori Dan Administrasi Good Governance*. Bandung: Refika Adhitama.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju Cetakan Pertama.
- Supeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu . Banda Aceh: Reinforcement And Development .*

### Jurnal, Skripsi

- Amaliah, S. (2021). Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Skripsi*.
- Febriana, A. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Journal Ilmu Riset Dan Akuntansi*.

- Maulida, A. B. (2021). Penelitian Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Journal Terapan Akuntansi Dan Bisnis, Vol I No 1*, 72 – 82
- Mamonto, N. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sininsayang Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Jurusan Ilmu Pertanian Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Vol 1 No 1*, 4.
- Nasirah. (2016). Analisis Terapan Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Puspitasari, O. D. (2012). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Syachbrani. (2012). Akuntansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Tugas Akhir Mata Kuliah. *Thesis Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gaja Mada*.
- Tampubolon, R. J. (2014). Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan 2013. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang*.
- Zaman, B. (2020) Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. *Journal PETA, Vol 5*.

#### **Internet / web site**

<https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677).

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5495).

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republikpublicesia Nomor 6410).

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735).

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Berseumber Dari Anggaran Pendapatn Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOMor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang PTB dan SDG's.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Percepatan dan Penurunan Stunting

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penyebaran *COVID – 19* Sebagai Bencana Non Alam Nasional.

Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031).

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 4)

Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 104).

Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.